

KORPRI sebagai Garda Terdepan dalam Implementasi Birokrasi Baru di IKN

Oleh: Charla Susanti, S.E
Analisis Pertahanan Ahli Muda Setditjen Postran Kemhan
Shantierna69@gmail.com

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis untuk mendistribusikan pusat pemerintahan yang selama ini terfokus di Pulau Jawa. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mengatasi persoalan kepadatan dan ketimpangan pembangunan, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur ke wilayah lainnya.

IKN dirancang sebagai kota modern dengan konsep “**Smart City**” dan “**Green City**”, yang mengintegrasikan teknologi canggih, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi energi. Konsep ini bertujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang ramah lingkungan, produktif, serta mendukung kualitas hidup masyarakat. Sebagai proyek strategis nasional, keberhasilan IKN sangat bergantung pada dukungan birokrasi yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan.

Dalam konteks ini, aparatur sipil negara (ASN) memegang peran sentral sebagai penggerak utama birokrasi. KORPRI, sebagai organisasi yang menaungi ASN, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan transisi menuju birokrasi modern dapat berjalan dengan lancar. Sebagai garda terdepan, KORPRI dituntut mampu mendorong ASN untuk menerapkan birokrasi yang efisien, sederhana, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sejak didirikan pada tahun 1971, KORPRI telah berperan dalam membina ASN agar memiliki kompetensi, profesionalisme, dan nilai-nilai integritas. Di era digitalisasi dan globalisasi saat ini, KORPRI dihadapkan pada tantangan baru untuk mengadaptasi ASN terhadap kebutuhan birokrasi modern di IKN. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran strategis KORPRI dalam mendukung transformasi ASN guna menjawab kebutuhan IKN sebagai kota masa depan.

Di tengah tuntutan perubahan menuju birokrasi yang lebih adaptif dan modern, KORPRI memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama dalam menciptakan sistem pemerintahan baru yang dapat mendukung visi IKN. Dengan peranannya sebagai garda terdepan, KORPRI perlu mendorong ASN untuk berinovasi dan mempercepat transformasi birokrasi agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan lingkungan yang terus berkembang.

b. Rumusan Masalah

- Bagaimana peran KORPRI dalam mendukung implementasi birokrasi baru yang efektif dan efisien di Ibu Kota Nusantara (IKN)?
- Tantangan apa saja yang dihadapi KORPRI dalam mempersiapkan ASN untuk beradaptasi dengan birokrasi yang lebih modern, inovatif, dan responsif di IKN?
- Strategi apa yang dapat diambil KORPRI untuk memfasilitasi transformasi ASN menuju sistem pemerintahan yang lebih adaptif, ramah teknologi, dan berkelanjutan?

c. Tujuan Penulisan

- Menganalisis peran KORPRI dalam implementasi birokrasi baru di IKN, serta kontribusinya dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang efisien dan berbasis teknologi.
- Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi KORPRI dalam proses penyiapan ASN untuk menjalankan tugas di IKN sesuai dengan visi kota yang modern dan berkelanjutan.
- Memberikan rekomendasi strategi bagi KORPRI untuk memaksimalkan peran ASN dalam mendukung birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu memenuhi kebutuhan publik secara optimal di IKN.

II. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Birokrasi Modern dan Efisiensi Pemerintahan

Birokrasi modern merupakan sistem pemerintahan yang berfokus pada efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan, birokrasi yang modern dan efisien harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, menggunakan teknologi sebagai alat utama untuk optimalisasi layanan, dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Menurut beberapa ahli, birokrasi modern mengedepankan inovasi dan adaptasi dalam

2. pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat memenuhi tantangan globalisasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Konsep ini menjadi dasar bagi KORPRI dalam menyiapkan ASN yang kompeten untuk mendukung birokrasi di IKN.

3. Peran KORPRI dalam Pembinaan ASN

Sebagai organisasi yang menaungi ASN, KORPRI memiliki tanggung jawab dalam pembinaan ASN untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan etika pelayanan publik. KORPRI tidak hanya berfungsi sebagai wadah sosial, tetapi juga memainkan peran strategis dalam meningkatkan kapasitas ASN melalui program pelatihan dan pengembangan yang berorientasi pada nilai-nilai pelayanan publik dan bela negara. Sejarah KORPRI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat karakter ASN yang berintegritas dan berjiwa kebangsaan, yang menjadi penting dalam mengelola perubahan birokrasi di era IKN.

3. Implementasi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Kota Berkelanjutan dan Berteknologi

Pemerintah Indonesia merancang IKN sebagai kota yang ramah lingkungan, terhubung secara digital, dan mampu mewujudkan konsep kota pintar atau "smart city." Visi ini menuntut birokrasi yang responsif terhadap perubahan, berorientasi pada teknologi, serta mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Pemindehan ibu kota ini memerlukan dukungan dari ASN yang adaptif dan berwawasan luas, sehingga keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada transformasi birokrasi yang efektif. Literatur terkait "smart city" dan tata kelola pemerintahan memberikan panduan penting bagi ASN dalam mewujudkan visi IKN yang modern dan efisien.

4. Tantangan dalam Transformasi Birokrasi

Tantangan utama dalam mewujudkan birokrasi baru di IKN mencakup adaptasi terhadap teknologi, manajemen perubahan, serta pembentukan budaya kerja yang inovatif. Penelitian tentang transformasi birokrasi menyoroti pentingnya keterampilan digital dan pemahaman ASN terhadap dinamika perubahan dalam pemerintahan. Birokrasi yang adaptif dan dinamis harus dibangun dengan fondasi yang kuat, sehingga ASN siap menghadapi tantangan perubahan ini. Literatur ini memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perubahan birokrasi di IKN dan peran penting KORPRI dalam memimpin proses adaptasi ASN.

III. Analisis dan Pembahasan

1. Peran KORPRI sebagai Penggerak Birokrasi Modern di IKN

Dalam proses pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), KORPRI memiliki peran sentral sebagai motor penggerak perubahan dalam birokrasi ASN. Sebagai organisasi yang menaungi ASN, KORPRI memiliki tanggung jawab untuk mendorong pembaruan dalam sistem birokrasi sehingga sesuai dengan visi dan kebutuhan IKN. KORPRI bertugas mempersiapkan ASN yang memiliki kapasitas

tinggi dalam hal profesionalisme, etika, dan adaptasi teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.

KORPRI dapat menginisiasi pelatihan dan pengembangan keterampilan yang menekankan pada penguasaan teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, KORPRI bukan hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai katalis yang mempersiapkan ASN untuk memenuhi tantangan birokrasi modern di kota yang berbasis teknologi ini.

2. Tantangan yang Dihadapi KORPRI dalam Menyiapkan ASN untuk Birokrasi IKN

Pemindahan ibu kota membawa tantangan besar bagi KORPRI, terutama dalam membentuk ASN yang mampu beradaptasi dengan birokrasi yang lebih cepat, adaptif, dan ramah lingkungan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

- **Adaptasi terhadap Teknologi Digital:** Mengingat bahwa IKN dirancang sebagai "smart city," ASN perlu memiliki keterampilan yang kuat dalam teknologi digital, termasuk penggunaan data dan sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Ini memerlukan pelatihan khusus yang intensif.
- **Perubahan Budaya Kerja:** ASN yang terbiasa bekerja dengan pendekatan konvensional mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis hasil yang diinginkan di IKN. KORPRI harus melakukan sosialisasi dan pelatihan budaya kerja baru agar ASN dapat beradaptasi secara efektif.
- **Kebutuhan Kompetensi yang Lebih Luas:** ASN di IKN diharapkan mampu menangani berbagai tantangan kompleks yang melibatkan inovasi, lingkungan hidup, dan teknologi. Ini memerlukan kompetensi lintas disiplin yang mungkin tidak sepenuhnya dikuasai ASN saat ini, sehingga pelatihan multidisiplin menjadi sangat penting.

3. Strategi KORPRI untuk Mendukung Birokrasi yang Responsif dan Efisien

Agar dapat mendukung transformasi birokrasi di IKN, KORPRI perlu menerapkan beberapa strategi kunci, antara lain:

- **Mendorong Inovasi dalam Pelayanan Publik**

KORPRI dapat mengembangkan program inovasi untuk mendorong ASN menciptakan solusi baru dalam pelayanan publik, termasuk sistem pelayanan berbasis aplikasi yang memungkinkan pelayanan yang cepat dan mudah diakses. Dengan inovasi ini, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi pelayanan yang sesuai dengan standar kota pintar di IKN.

- Pembinaan ASN yang Berkelanjutan

Untuk memastikan keberlanjutan adaptasi ASN terhadap kebutuhan IKN, KORPRI perlu melaksanakan program pembinaan berkelanjutan yang menekankan pada pengembangan keterampilan digital, kesadaran lingkungan, dan kepekaan terhadap perubahan masyarakat. Pembinaan ini juga harus melibatkan peningkatan kesadaran ASN akan peran mereka sebagai pelayan publik yang andal.

- Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

KORPRI perlu menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya serta sektor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan yang relevan, seperti pelatihan penggunaan teknologi mutakhir dan manajemen perubahan. Kolaborasi ini juga mencakup pembentukan pusat inovasi yang dapat membantu ASN dalam mencari solusi atas berbagai tantangan di lapangan.

4. Dampak Implementasi Birokrasi Baru terhadap Pelayanan Publik di IKN

Dengan diterapkannya birokrasi modern di IKN, diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik. ASN yang terampil dalam teknologi dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat, sementara budaya kerja yang responsif dan kolaboratif akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis. Transformasi ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan menciptakan citra positif bagi IKN sebagai model pemerintahan yang modern dan adaptif.

5. Kontribusi KORPRI dalam Mencapai Visi IKN sebagai Kota Berkelanjutan dan Inovatif

Sebagai garda terdepan dalam birokrasi ASN, KORPRI berkontribusi penting dalam mencapai visi IKN yang berkelanjutan dan inovatif. Dengan mempersiapkan ASN yang siap beradaptasi dengan sistem pemerintahan yang berorientasi pada lingkungan dan teknologi, KORPRI membantu memastikan keberhasilan pemindahan ibu kota ini sebagai contoh nyata dari kota masa depan yang ramah lingkungan dan efisien. Ini mencerminkan komitmen KORPRI untuk membentuk ASN yang bukan hanya melayani negara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika pemerintahan Indonesia, di mana peran aparatur sipil negara (ASN) menjadi sangat penting dalam memastikan

keberhasilan proyek strategis ini. KORPRI sebagai organisasi yang menaungi ASN berperan sebagai garda terdepan dalam mendukung implementasi birokrasi baru yang lebih modern, efisien, dan adaptif di IKN.

Melalui upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas ASN, KORPRI mempersiapkan SDM yang berorientasi pada teknologi, berwawasan lingkungan, dan memiliki etos kerja yang inovatif. Meski tantangan dalam proses ini tidak sedikit, mulai dari kebutuhan adaptasi teknologi hingga perubahan budaya kerja, KORPRI memiliki potensi untuk memimpin ASN agar menjadi agen perubahan yang mendukung tercapainya visi IKN sebagai kota modern dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi

1. Penguatan Program Pelatihan Berbasis Teknologi
KORPRI perlu mengintensifkan program pelatihan yang berfokus pada keterampilan digital dan teknologi, mengingat IKN dirancang sebagai kota pintar yang memerlukan ASN yang mahir dalam penggunaan teknologi untuk optimalisasi layanan publik.
2. Implementasi Budaya Kerja yang Adaptif dan Kolaboratif
KORPRI dapat memperkuat upaya sosialisasi dan internalisasi budaya kerja baru yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis inovasi di kalangan ASN, sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi modern yang diharapkan di IKN.
3. Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Akademisi

Untuk mempercepat peningkatan kapasitas ASN, KORPRI perlu menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan dalam pelatihan keterampilan digital dan pengelolaan lingkungan, sehingga ASN lebih siap untuk mendukung keberlanjutan dan visi ramah lingkungan di IKN.

Referensi

1. UU.No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
3. Bappenas. (2022). *Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara: Konsep Smart City dan Green City di IKN*.
4. Kementerian PUPR. (2023). *Laporan Keberlanjutan Lingkungan IKN*.